

AKTIVISME DIGITAL DALAM KONTESTASI POLITIK RUANG

Addin Kurnia Putri

Universitas Sebelas Maret, addinkurniaputri@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Aktivisme digital menandai perkembangan gerakan dan budaya partisipatif dalam penggunaan teknologi media baru. Media baru tidak saja menjadi sebuah ruang berkumpul dan berinteraksi namun juga menjadi ruang berkolaborasi dan bergerak. Beragam isu lingkungan dikampanyekan melalui media sosial. Tulisan ini menyoroti aktivisme digital terkait isu gerakan lingkungan dengan metode multi perspektif. Gerakan lingkungan menjadi salah satu bagian dari strategi agensi dalam demokrasi atas kontestasi politik ruang. Strategi gerakan melalui media baru dipahami sebagai bentuk perlawanan dengan memobilisasi massa secara lebih masif. Akan tetapi, media sosial bukan menjadi faktor utama keberhasilan dari sebuah gerakan. Lebih jauh, perlu menganalisis mengapa sebuah gerakan berhasil mendapatkan banyak dukungan dan mengapa gerakan lain kurang mendapat perhatian. Bagaimana sebuah gerakan dapat didefinisikan sebagai ideologi bersama ketika pengguna media sosial memiliki latar belakang heterogen sehingga yang terwujud adalah jaringan antar aktor yang lemah. Tidak seperti gerakan buruh misalnya. Satu kepentingan dengan satu ideologi yang sama sehingga mewujudkan jaringan ikatan yang sangat kuat. Media baru memudahkan untuk menanggapi dan menyebarkan sebuah isu gerakan. Namun, belum tentu semua gerakan mampu mendapatkan banyak perhatian.

Kata kunci: Aktivisme digital; Budaya partisipatif; Gerakan lingkungan; Media baru

1. PENDAHULUAN

Sekitar satu dekade silam, Indonesia dihebohkan dengan isu reklamasi di Teluk Bena. Tepatnya tahun 2012, PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) berencana mengembangkan kawasan perairan seluas 838 hektar di teluk Bena. Dalam hal ini, Gubernur Bali memberikan izin untuk mereklamasi teluk benoa sebagai kawasan pariwisata. Sementara itu, Universitas Udayana Bali telah melakukan studi kelayakan atas rencana reklamasi Teluk Bena yang dinyatakan tidak layak (Suryadana et al., 2016), berdasarkan kajian dari aspek teknis, lingkungan, sosial budaya dan ekonomi finansial.

Merespon isu tersebut, muncullah aliansi masyarakat sipil Bali yang terdiri dari institusi dan individu, misalnya mahasiswa, LSM, seniman, pemuda, musisi, akademisi, dan individu peduli lingkungan. Mereka menamainya sebagai Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi atau disingkat ForBALI. Bagi mereka, reklamasi Teluk Bena adalah sebuah kebijakan penghancuran Bali (Dewi, 2019; Nugroho, 2018; Suantika, 2015; Vali, 2017; Wiranata & Siahaan, 2019). Gerakan inipun banyak bergaung di media sosial. ForBALI telah melakukan mobilisasi massa dalam aksi demo tidak saja di ruang offline, namun juga melalui ruang online seperti Facebook, Twitter dan Instagram. ForBALI tumbuh sebagai masyarakat jejaring dalam ruang digital. Hingga akhirnya, reklamasi Teluk Bena dibatalkan sebagai buah perjuangan panjang perlawanan dari masyarakat selama bertahun-tahun (Nugraha, 2019; Suwana, 2021).

Tak hanya Teluk Bena, beragam isu kerusakan lingkungan juga bermunculan di Indonesia, misalnya reklamasi Jakarta, penambangan di beberapa wilayah Indonesia hingga kini muncul mega proyek besar pemindahan ibu kota negara (IKN) baru dari Jakarta ke Kalimantan (Pandit, 2019). Seiring dengan isu potensi kerusakan lingkungan, juga bermunculan beragam gerakan-gerakan masyarakat untuk melindunginya. Gerakan-gerakan

ini pun mulai dibingkai dengan beragam strategi mobilisasi massa, termasuk dengan pemanfaatan media digital. Bahkan, gerakan-gerakan turun ke jalan menyuarakan aspirasi kini telah diikuti aktivisme digital dengan sekedar *click, like, comment, share* melalui media sosial (Lim, 2013). Lantas, apakah media digital yang berperan penting dalam keberhasilan aktivisme digital?.

2. METODE PENELITIAN

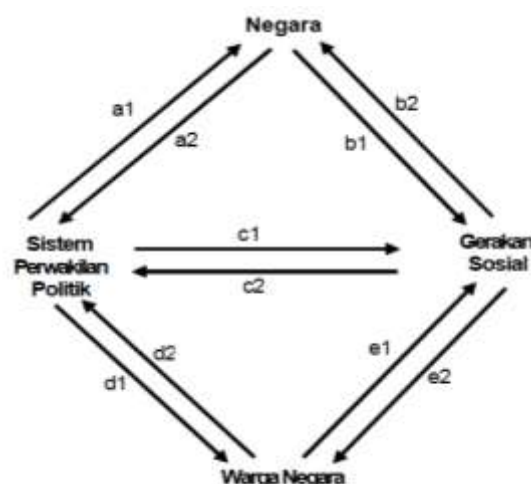
Kajian ini menganalisis aktivisme digital dengan metode multiperspektif menggunakan interpretatif postmodern dengan memakai referensi intertekstualitas. Fenomena aktivisme digital merupakan artefak budaya siber yang menempatkan realitas media tidak sekedar menggambarkan apa yang tampak di permukaan, melainkan membongkar nilai-nilai yang terkandung di dalam teks media itu sendiri. Kajian ini berfokus pada *multi-sited fieldwork* (Saukko, 2003), yaitu praktik mempelajari bagaimana fenomena tertentu terbentuk di berbagai lokasi atau situs.

3. ANALISIS DATA

Perkembangan kapitalisme telah menimbulkan privatisasi ruang dengan perubahan orientasi semua aspek nilai ke arah ekonomi. Gerakan-gerakan lingkungan muncul sebagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap kebijakan yang mengarah pada komersialisasi ruang di beberapa wilayah. Secara diagramatik, hubungan gerakan sosial dengan negara dan sistem politik secara luas pada Gambar 1.

Gambar 1 menjelaskan upaya-upaya gerakan dan dampak protes sosial pada sistem politik dan sebaliknya dampak yang ditimbulkan sistem politik pada gerakan sosial. Dengan demikian, gerakan sosial merupakan saingan potensial bagi sistem politik perwakilan dan bisa memainkan peran besar dalam merestrukturisasi hubungan negara dengan warga negara. Dalam konteks permasalahan gerakan lingkungan, terjadi kontestasi politik ruang antara pihak yang mendukung pembangunan dalam hal ini pembuat kebijakan dan pemilik modal dengan pihak yang melawan. Permasalahan yang berkaitan di dalam kasus ini adalah kebijakan privatisasi ruang telah memunculkan aksi gerakan yang dapat berpengaruh terhadap keberjalanan pembangunan. Hal ini juga berimplikasi terhadap demokrasi modern. Dampak protes sosial pada partai politik dan proses-proses politik resmi, dan implikasi pada representasi negara demokratis modern, yang mendorong isu publik menjadi agenda politik.

Gambar 1. Hubungan Gerakan Sosial dalam Sistem Politik



Sumber: disarikan dari (Jenkins dan Klandermans, 1995)

Singh berpendapat bahwa gerakan sosial baru menaruh konsepsi ideologis pada asumsi masyarakat sipil telah terdesak oleh ekspansi pasar dan ketidakadilan negara. Dalam hal ini gerakan diumpamakan sebagai pertahanan diri. Selain itu, GSB juga mengubah paradigma marxis dengan tidak lagi memakai istilah perjuangan kelas. Perjuangan tidak lagi mengelompok pada satu kelas tetapi lintas kelas. Serta pada dasarnya GSB melibatkan politik dan aksi akar rumput dan didefinisikan sebagai pluralitas cita-cita oleh heterogenitas basis sosial. Gerakan sosial baru tidak melibatkan dirinya pada wacana ideologis yang meneriakan ‘anti kapitalisme’, ‘revolusi kelas’, dan ‘perjuangan kelas’. Aktor-aktor GSB adalah plural (Singh, 2001).

Singh mengklasifikasikan tradisi teoritis gerakan ke dalam gerakan sosial klasik, neoklasik, dan baru. Dalam tradisi klasik, citra sosial massa berupa massa kolektif yang terdiri dari sekumpulan individu menanggapi berbagai isu dan peristiwa yang menjadi kepentingan publik. Pemahaman terhadap konsep kolektivitas crowd, riot, dan bentuk-bentuk lain dari aksi kolektif konfliktual dengan cara tertentu memberikan pemicu bagi ilmuwan sosial untuk menguji signifikansi aksi kolektif sebagai data sosial dan merumuskan teori-teori gerakan sosial dan aksi sosial kolektif.

Jika dianalisis dalam teori gerakan, fenomena gerakan sosial yang menggunakan media digital bisa disebut sebagai *new social movement*. Gerakan bukan lagi mengenai persoalan ekonomi sebagaimana perjuangan kelas pekerja industri, tetapi memperjuangkan isu-isu politik identitas dan kualitas hidup di masa depan seperti halnya gerakan agraria dan gerakan lingkungan. Gerakan dipandang sebagai respon atas pos-industri. Aktornya bukan lagi kelas tertentu melainkan meluas bahkan melibatkan intelektual, anak muda, mahasiswa dan lain sebagainya. Diketahui ciri khas gerakan sosial baru dalam tiga hal: *Pertama*, gerakan berfokus pada masalah baru, kepentingan baru, dan area konflik sosial baru. Melawan serangan politik, ekonomi, teknologi dan birokrasi pada semua aspek kehidupan. Fokus utama dari gerakan ini adalah kualitas hidup, identitas kelompok, perluasan habitat, dan lunak, non-ekonomi, Ini adalah perjuangan masyarakat sipil atas nilai-nilai material. Gerakan baru ini tidak terutamamengartikulasikan kebutuhan ekonomi, melainkan isu-isu budaya yang terkait dengan isu-isu otonomi individu dan gerakan baru yang tidak terlihat yang mempengaruhi orang-orang tanpa memandang status sosial. Berfokus pada risiko. *Kedua*, keanggotaan tidak terkait dengan kelas tertentu, melainkan tumpang tindih dengan klasifikasi tradisional, mengungkapkan masalah penting yang dihadapi oleh anggota berbagai kelas. *Ketiga*, gerakan sosial baru cenderung mengambil bentuk jaringan hubungan yang luas dan relatif longgar daripada menggunakan organisasi hirarki yang kaku.

Misalnya, konteks gerakan ForBALI memusatkan perhatian pada isu lingkungan pada terpaan industri pariwisata di Bali. Sebagai kekuatan ekonomi, industri pariwisata (reklamasi teluk benoa) dianggap dapat merusak lingkungan dan alam sekitar. Gerakan ForBALI juga tidak memperjuangkan kelas sosial tertentu, melainkan lintas sektoral mulai dari masyarakat adat, aktivis lingkungan, seniman hingga mahasiswa yang hendak mengungkap masalah penting untuk berbagai kalangan yaitu: masalah lingkungan. Gerakan sosial baru memusatkan strateginya pada peran nalar (dan aksi kolektif) serta peran refleksi. Peran nalar sejalan dengan kemampuan aktor ForBALI dalam memobilisasi sumber daya. Sedangkan peran refleksi adalah pemaksaan solusi atas tuntutan mereka dengan memastikan solusi tersebut sejalan dengan tujuan gerakan yaitu pembatalan reklamasi Teluk Benoa. Aktivisme digital menggunakan media sosial sebagai strategi untuk mempublikasikan target massa gerakan, meminta dan mendorong dukungan, berkoordinasi, menyebarkan informasi, mengumpulkan dana, serta mempromosikan berbagai tujuan, baik individu maupun kolektif. ForBALI memiliki struktur, kultur dan aktor-aktor sosial dalam pergerakannya. Sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Analisis Struktur, Kultur, dan Aktor Sosial dalam Gerakan Lingkungan

Struktur	Kultur	Aktor/Agensi
<p>Anggota ForBALI memiliki struktur sosial horizontal. Status dan peran mereka sama antara satu dengan yang lain meski berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. ForBALI memiliki struktur sosial vertikal apabila dengan kapitalis dan pemerintah.</p>	<p>Gerakan dibingkai dalam kultur Bali dengan mayoritas masyarakat beragama Hindu dan memiliki falsafah tri hita karena, (1) parahyangan: kongkretisasi tempat pemujaan kepada Tuhan (2) pawongan: perwujudan hubungan manusia dengan sesamanya (3) palemahan: wujud hubungan manusia dengan alam.</p>	<p>Masyarakat sipil Bali lintas sektoral baik lembaga maupun individu seperti mahasiswa, LSM, seniman, pemuda, musisi, akademisi. ForBALI diinisiasi WALHI.</p>

Sumber: hasil analisis (2023)

Bagi Manuel Castells (Castells, 2004), masyarakat dunia dewasa ini sudah disatukan melalui teknologi informasi yang kemudian disebut sebagai masyarakat jejaring. Fenomena revolusi teknologi informasi berdampak pada perubahan ruang konvensional dalam interaksi menjadi ruang virtual. Batas-batas etnis, teritori dan ideology sudah semakin kabur atau sudah tidak sejelas dulu. Kehidupan masyarakat dunia ditandai oleh interkoneksi dan interdependensi. Seperti halnya aktivisme digital yang memanfaatkan ruang digital sebagai strategi gerakan. Media sosial menjadi alat untuk mendapatkan dukungan massa sehingga isu ini bisa menguak hingga ke tingkat dunia. Aktivisme digital tumbuh menjadi masyarakat jejaring yang terhubung melalui ruang virtual.

Melalui peralihan berbagai aktivitas pergerakan ke ruang virtual, ruang publik konvensional pun bergerak ke ruang publik virtual, di mana realitas politik dibingkai, moralitas dikonstruksi, nilai-nilai ditransformasikan, komunikasi dimediasi, dan berbagai kebebasan dipamerkan. Aktivisme digital inilah yang menjadikan masyarakat jaringan sebagai ciri khas interaksi di dunia maya.

Ketika membahas kontroversi politik, kajian sosiologi telah menggunakan analisis spasial untuk memetakan istilah gerakan sosial untuk menentukan dampak lokasi geografis terhadap imajinasi, praktik, saluran dan media ketika kontroversi muncul (Leitner et al., 2008). Jejaring sosial merupakan struktur yang terbentuk dalam jaringan digital (Castells, 2004). Jaringan gerakan modern dapat melampaui batas ruang dan waktu, dengan demikian melawan monopoli ruang dan waktu oleh penguasa. Gerakan mobilisasi massa melalui media sosial, tidak hanya menghimpun masyarakat lokal tetapi juga masyarakat dunia.

4. KESIMPULAN

Ruang telah menjadi arena kontestasi politik. Beragam kepentingan telah bercampur yang mengarah pada ketegangan. Privatisasi ruang telah menggerakkan sekelompok orang untuk bergerak, tidak saja secara fisik tetapi juga mengandalkan ruang digital. Jaringan hibrid di mana ruang digital dan ruang kota terhubung dan tumpang tindih. Intermodalitas yang menciptakan ruang hybrid. Itu adalah ruang komunikasi yang memungkinkan gerakan terbentuk dan terhubung dengan masyarakat luas melalui kekuatan teknologi informasi di luar kendali instansi pemerintah. Aktivisme digital menggunakan aktivitas kolaboratif dalam media digital yang terhubung sebagai simpul dalam jaringan ruang kota.

Gerakan lingkungan dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial baru. Karena yang mereka perjuangkan bukanlah wacana kelas melainkan isu lingkungan, bukan hanya kepentingan satu kelas. Aksi gerakan menjadi bagian dari strategi aktor sebagai upaya representasi demokrasi.

Sehingga keberlanjutan strategi perlawanan melalui media sosial hingga ke aksi nyata dapat dipahami sebagai bentuk transformasi strategi gerakan dalam memobilisasi massa.

Terlepas dari klasifikasi gerakan tersebut, perlu dipertanyakan pula bagaimana sebuah gerakan sosial baru mampu memiliki ideologi yang sama. Ideologi adalah ruh atau jiwa yang memotori sebuah gerakan. Ruang digital memiliki jaringan lemah karena heterogenitas penggunaannya. Maka, pada akhirnya aktivitas gerakan semacam ini menjadi tidak stabil. Kelemahan dari ikatan aktor dalam sebuah gerakan tentu memberikan dampak pada tidak tercapainya tujuan dari sebuah gerakan.

REFERENSI

- Castells, M. 2004. *Informationalism, Networks, And The Network Society: A Theoretical Blueprint*. *The Network Society: A Cross-Cultural Perspective*, 3–45.
- Dewi, G. S. 2019. *Penolakan Masyarakat terhadap reklamasi Teluk Benoa Provinsi Bali*. *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4, No. 1.
- Jenkins, J. C., dan Klandermans, B. 1995. *The Politics of Social Protest*. Taylor & Francis.
- Leitner, H., Sheppard, E., dan Sziarto, K. M. 2008. *The Spatialities of Contentious Politics*. *Transactions of the Institute of British Geographers*, Vol. 33, No. 2.
- Lim, M. 2013. *Many Clicks But Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia*. *Digital Activism in Asia Reader*, 127.
- Nugraha, A. T. 2019. *Social media in the planning and conflict: the case of For BALI movement against Benoa Bay reclamation plan*.
- Nugroho, S. F. 2018. *Kesadaran Kolektif Dalam Gerakan Sosial Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (Studi Gerakan Lingkungan Hidup Penolakan Reklamasi Teluk Benoa Yang Dilakukan Oleh ForBALI di Denpasar, Bali)*. Universitas Brawijaya.
- Pandit, I. 2019. *Dampak Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Negara Serta Penyelesaian Sengketa Hukumnya*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2.
- Saukko, P. 2003. *Doing research in cultural studies: An introduction to classical and new methodological approaches*. Sage.
- Singh, R. 2001. *Social movements, Old and New: A post-modernist critique*. Sage.
- Suantika, W. 2015. *Resistensi Masyarakat Lokal terhadap Kapitalisme Global: Studi Kasus Reklamasi Teluk Benoa Bali Tahun 2012-2013*. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 8, No. 1.
- Suryadana, P., Noak, P. A., dan Azhar, M. A. 2016. *Perilaku Kolektif Masyarakat Adat dalam Terbentuknya Pasubayan Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa Tahun 2016*. Udayana University.
- Suwana, F. 2021. *Digital Activism in Bali: The For BALI Movement*. *Security, Democracy, and Society in Bali: Trouble with Protection*, 253–284.
- Vali, T. A. 2017. *Gerakan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Dalam Penolakan Reklamasi Teluk Benoa Nusa Dua, Bali*. Universitas Airlangga.
- Wiranata, I. M. A., dan Siahaan, H. 2019. *Konstruksi Identitas Kolektif Warga Desa Adat dalam Gerakan Tolak Reklamasi Teluk Benoa di Bali*. *Jurnal Kajian Bali*, Vol. 9, No. 2.